



Analisis Pengelolaan Dana Bos Di SMP Nurul Azizi Medan

Rudi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author: ✉ rudihasibuanuinsu@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received

01 Januari 2021

Revised

14 Januari 2021

Accepted

10 Februari 2021

Penelitian ini bertujuan 1) Menggambarkan Bagaimana relevansi pengelolaan Dana BOS terhadap proses belajar mengajar di SMP Nurul Azizi Medan 2) Bagaimana pengelolaan dana BOS di di SMP Nurul Azizi Medan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif dan teknik yang digunakan adalah observasi dan wawancara, subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dari Milles dan Hubermen analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi, penyajian dan simpulan. Tehnik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Relevansi pengelolaan dana bos terhadap proses belajar mengajar sangatlah relevan dan besar pengaruhnya, karena dana bos yang di terima ditujukan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam melangsungkan proses belajar mengajar di SMP Nurul Azizi Medan 2) pengelolan dana bos di SMP Nurul Azizi Medan ini alhamdulillah baik yaitu masih berjalan sesuai dengan koridor atau ketetapan yang telah ditentukan dalam juknis dana bos.

Kata Kunci

Pengelolaan, Dana Bos, Relevansi

PENDAHULUAN

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan.

Program BOS merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu peraturan kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka memperlancar penuntasan buta aksara seperti amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2005, untuk itu Menteri Pendidikan membentuk tim pelaksana yang diatur dalam surat edaran nomor 5421/MPN/OT/2005.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOS ditinjau dari 7 prinsip pengelolaan BOS, maka diperlukan suatu analisis. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis digunakan untuk menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan. Analisis juga digunakan untuk menentukan tolak ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan dan penentuan.

Melihat arti pentingnya analisis pengelolaan program BOS dalam penyelenggaraan pendidikan, maka penelitian dalam penelitian tentang "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah SMP Nurul Azizi Medan.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang diambil adalah pendekatan kualitatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2001). Dalam penelitian kualitatif, peran peneliti sangat penting yakni sebagai instrumen kunci. Hal ini dapat difahami bahwa keabsahan data nanti akhirnya diserahkan pada subyek penelitian, apakah data yang diperoleh maupun analisisnya benar-benar sesuai dengan persepsi/pandangan subyek. Oleh karena itu kehadiran peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data, dan sekaligus melaporkan hasil penelitian (nasution, 1996).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan hasil penelien yang berkaitan dengan keadaan di lapangan. Lokasi SMP Nurul 'Azizi Medan. Penelitian yang jelas serta dapat mengetahui data yang akan di angkat. Penulis telah memperoleh data sesuai dengan yang di peroleh. Kemudian data tersebut akan dianalisis guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang di perlukan. Kemudian data tersebut akan di analisis guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan penelitian yang di lakukan. Berdasarkan hasil penelitian itulah maka dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Relevansi Pengelolaan Dana BOS Terhadap Belajar Mengajar

Salah satu pengelolaan keuangan sekolah yang dilakukan adalah pengelolaan BOS. BOS sebagai salah satu sumber pendapatan sekolah harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan peserta didik. Pengelolaan BOS setiap sekolah diatur pemerintah melalui Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS. Dalam petunjuk teknis tersebut ada 7 prinsip utama pengelolaan berdasarkan konsep MBS yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOS di sekolah, maka diperlukan suatu analisis. Analisis pengelolaan merupakan analisis untuk menentukan tolak ukur dan tingkat keberhasilan pengeloan suatu program. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. Tujuan dari pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah menurut (Hamdi, 2014) adalah:

1. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali
2. Memelihara barang-barang sekolah
3. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sedangkan standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA atau MA. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Maka sudah sepantasnya pengelolaan dan pengalokasian atau penggunaan keuangan dilakukan oleh sekolah dengan baik. Menurut Syaiful Sagala dalam Mulyono (2010), jika pembiayaan pendidikan tidak terpenuhi, paling tidak sesuai dengan kebutuhan minimal, secara nasional akan ditemukan dampak berupa terjadinya erosi kualitas sehingga kontribusinya terhadap pembangunan rendah.

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian, pembahasan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap hasil penelitian. Pembahasan ini dapat diuraikan sesuai temuan penelitian sebagai berikut: Tahap pertama: relevansi Pengelolaan Dana BOS Terhadap Belajar Mengajar. Pengelolaan adalah seni dalam mengatur dan menata dalam sebuah wadah demi tercapainya tujuan yang di tetapkan bersama. Pengelolaan ini mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Relevansi pengelolalan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Nurul Azizi Medan ini terhadap proses belajar mengajar sudah sesuai atau relevan, karena setiap dana bos yang di peruntukkan terhadap sarana prasarana sekolah layak dipakai atau digunakan untuk proses belajar mengajar di SMP Nurul Azizi Medan.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam program BOS, dana yang diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Dengan demikian, program BOS sangat mendukung implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang (otonomi), pemberian *fleksibilitas* yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah (Anwar, 2013).

a) Swakelola dan Partisipatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, swakelola berarti pengelolaan sendiri. Swakelola yang dimaksud disini adalah swakelola dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaaan dengan swakelola menata lainnya, atau oleh kelompok masyarakat. Pelaksanaan program dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu aspek penting dalam menerapkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah adalah partisipasi dari masyarakat. Partisipasi penting untuk meningkatkan rasa memiliki, peningkatan rasa memiliki akan meningkatkan rasa tanggung jawab, dan peningkatan tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi/kontribusi.

MBS menuntut partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (kepala sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya) untuk andil secara insentif di dalam operasi sekolah. Partisipasi yang insentif menjadi keharusan karena sekolah harus makin banyak tumbuh dengan menyangga sendiri seara finansial (Priansa dan Garnida, (2015). Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut mungkin dapat menimbulkan tumpang tindih kepentingan antara sekolah, orang tua dan

masyarakat. Dengan demikian perlu dibatasi bentuk partisipasi setiap unsur secara jelas dan tegas.

b) Transparan

Menurut Engkoswara manajemen sekolah dilaksanakan secara transparan, mudah diakses anggota, manajemen memberikan laporan secara kontinu sehingga *stakeholders* dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Manajemen pendidikan yang transparan memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan keyakinan *stakeholders* terhadap kewibawaan dan citra sekolah yang *good governance* dan *clean governance*. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam hal ini adalah masyarakat dan warga sekolah dapat diperoleh secara langsung. Jadi, Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.

c) Akuntabel

Menurut PP no 48 Tahun 2008 pasal 59, prinsip akuntabilitas dilakukan dengan memberikan pertanggung jawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan praturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien kepada pemberi tanggung jawab. Menurut Nanang Fattah ukuran pendidikan yang akuntabel adalah:

1. Tujuannya jelas dan dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus
2. Kejadiannya dapat diawasi agar selalu dapat mengarah pada pencapaian tujuan
3. Hasilnya efektif karena tujuan tercapai
4. Proses pencapaian hasil itu efisien dengan mengingat sumber-sumber yang tersedia
5. Menjalankan mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan.

Tuntutan akuntabilitas sekolah sebagai salah satu sektor publik adalah untuk lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*).

d) Demokratis

Istilah demokratis berasal dari bahasa Yunani kuno, yang terdiri dari dua kata yaitu *demos* yang bermakna rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, dan apabila digabungkan bermakna kekuasaan ditangan rakyat. Istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan

mekanisme kepemimpinan lembaga pendidikan, namun secara substantif sekolah demokratis adalah membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Sekolah demokratis akan terwujud jika semua informasi penting dapat dijangkau *stakeholder* sekolah sehingga semua unsur tersebut memahami arah pengembangan, berbagai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang sedang atau akan ditempuh. Dengan demikian mereka akan bisa menganalisis relevansi kebijakan, memahami, mengkritisi, dan memberi masukan, serta menentukan kontribusi dan partisipasi yang akan diberikan untuk kesuksesan pelaksanaan program-program sekolah tersebut (Rosyada, 2004). Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.

e) Efektif dan Efisien

Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik, kegiatan tersebut disebut efisiensi dan efektifitas. Gie menyatakan bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan. Sedangkan Akmal menyatakan bahwa efektifitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (*doing the right thing*) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil (Priansa Garnida, (2015). Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota.

f) Tertib Administrasi dan Pelaporan

Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Laporan keuangan merupakan catatan dan rangkuman kegiatan transaksi untuk menyediakan informasi akuntansi kepada pemangku kepentingan. Menurut Suwardjono dalam (Fathoni, 2015). tujuan utama pelaporan keuangan organisasi nonbisnis seperti sekolah adalah harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut.

Adapun tujuan-tujuan Spesifik dari pelaporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain dalam menilai jasa-jasa yang disediakan organisasi dan kemampuannya untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut.

2. Menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain dalam menilai bagaimana para manajer organisasi nonbisnis telah melaksanakan tanggungjawab kepengurusannya dan aspek-aspek lain kinerjanya.
 3. Menyediakan informasi tentang sumberdaya, kewajiban dan sumberdaya (*aset*) bersih organisasi, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya dan hak atas sumberdaya tersebut.
 4. Menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama satu periode.
 5. Menyediakan informasi tentang bagaimana organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas atas sumber likuid lain, tentang pinjaman dan pelunasannya, dan tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
 6. Pelaporan keuangan harus mencakup penjelasan-penjelasan dan interpretasi untuk membantu para pemakai memahami informasi yang disediakan. Menurut Petunjuk Teknis BOS SMA 2015, pelaporan dilakukan dengan menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Sekolah penerima dana BOS SMA melakukan pelaporan atas penggunaan dan pengelolaan dana yang diberikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program (Suwardjono, 2005).
- g) Saling Percaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya diartikan sebagai mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada dan menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur. Pengertian percaya dalam penelitian ini adalah yakin terhadap orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan BOS jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya. Kepercayaan yang dimaksud yaitu orang tua percaya pada kepala sekolah untuk mengembangkan program-program sekolah menuju *idealitas* yang diinginkan dan kepala sekolah juga percaya pada guru untuk mengembangkan program-program kurikulumnya serta mengorganisir pelaksanaan program-program itu. Kepercayaan juga meliputi kepercayaan sekolah terhadap pemerintah sebagai pemberi dana dalam mengelola dan menyalurkan dana BOS.

Pengelolaan dana bos yang baik akan berakibatkan baik terhadap proses belajar mengajar yaitu dengan terjangkaunya biaya, dan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, sehingga peserta didik yang kurang mampu juga bisa merasakan pendidikan yang layak untuk dirinya sebagai generasi bangsa yang lebih baik lagi. Tahap kedua: pengelolaan dana bos sesuai dengan 7 prinsip pengelolaan dana bos.

Pengelolaan adalah esensial yang baik di semua kerja sama yang dikoordinasi, di semua tingkat organisasi, yang pelaksanaannya sering ada kendala atau sering ada masalah. Pengelolaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap sekolah. Prinsip pengelolaan dana bos merupakan hal yang diperlukan sekolah

sebagai pegangan atau pedoman dalam melaksanakan dan mengelola dana bos agar relevan dengan proses belajar mengajar didalam lingkungan sekolah. Yaitu lingkungan yang nyaman, aman, dan memadai sesuai dengan standar pendidikan nasional. Tim pengelola dana bos di SMP Nurul Azizi Medan dalam hal ini melakukan pengelolaan sesuai dengan yang ada dalam juknis dana bos yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Relevansi Pengelolaan Dana BOS Terhadap Belajar Mengajar. Pengelolaan adalah seni dalam mengatur dan menata dalam sebuah wadah demi tercapainya tujuan yang di tetapkan bersama. Pengelolaan ini mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Relevansi pengelolalan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Nurul Azizi Medan ini terhadap proses belajar mengajar sudah sesuai atau relevan, karena setiap dana bos yang di peruntukkan terhadap sarana prasarana sekolah layak dipakai atau digunakan untuk proses belajar mengajar di SMP Nurul Azizi Medan. Prinsip pengelolaan dana bos merupakan hal yang diperlukan sekolah sebagai pegangan atau pedoman dalam melaksanakan dan mengelola dana bos agar relevan dengan proses belajar mengajar didalam lingkungan sekolah. Yaitu lingkungan yang nyaman, aman, dan memadai sesuai dengan standar pendidikan nasional. Tim pengelola dana bos di SMP Nurul Azizi Medan dalam hal ini melakukan pengelolaan sesuai dengan yang ada dalam juknis dana bos yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).<http://bos.kemdikbud.go.id/home/about> (diakses pada tanggal 23 Januari 2021).
- Anwar, Moch. Idochi. 2013. Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta,.
- Danim, Sudarwan. 2008. Visi Baru Manajemen Sekolah. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Departemen RI. 2016. Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Ar- Rasyid, Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rasyid Media.
- Dirjen Pendidikan Menengah tentang petunjuk teknik BOS SMA tahun 2015
- E. Mulyasa. 2006. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi & Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: rineka cipta.
- Fattah, Nanang. 2013 Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Masyuri dan Zainuddin. 2008. Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif). Bandung: PT Refika Aditama.
- Mesiono. 2014. Manajemen Organisasi. Bandung: Cita Pustaka.
- Minarti, Sri. 2016. Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyono. 2010. Konsep Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan Pendidikan yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Khafifah Julia Dwi. 2010. Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 1 Patuk Kabupaten Gunungkidul. Skripsi. Yogyakarta: UNY,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 12
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- Priansa, Donni Juni dan Agus Garnida. 2015. Manajemen Perkantoran. Bandung: Alfabeta,
- Republika. 2016. DPD Soroti Temuan BPK Terkait Pengelolaan Dana BOS. Melalui Rizky Amalia Fajri. 2012. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMA) di SMP Negeri 3 Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Tahun 2011. Skripsi. Yogyakarta: UNY
- Rochaety, Eti., Pontjorini Rahayuningsih, Prima Gusti Yanti. 2010. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rosyada, Dede. 2004 Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Kencana.

Copyright Holder :

© Name. (2021).

First Publication Right :

© **ALACRITY : Journal Of Education**

This article is under:



[Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)